

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BOALEMO



TAHUN 2023 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah RabbulAlamin atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, yang telah memperindah kehidupan kita dengan menanamkan sifat kasih sayang yang melimpah kepada kita semua hamba-Nya sehingga atas Izin dan Kuasa-Nya, Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023– 2026 dapat tersusun dan diselesaikan.

Rencana Strategis yang memuat arah pembangunan Kabupaten Boalemo Empat tahun kedepan berdasarkan Tujuan Pembangunan, merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting dan strategis. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah, pihak DPRD, swasta dan masyarakat untuk dijadikan panduan dalam menjalankan peran masing-masing dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Boalemo.

Akhirnya, atas segala partisipasi dan dukungan semua pihak dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih.

Semoga pula Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan dan kearifan-Nya kepada kita sekalian sehingga capaian pembangunan daerah lima tahun mendatang, lebih baik dari lima tahun sebelumnya.

Tilamuta,

2022

**KEPALA BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
KABUPATEN BOALEMO**

Drs. MOHAMMAD TAUFIQ KUMALI, MM

PEMBINA UTAMA MUDA IV/C

NIP. 19690114 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL & GAMBAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah	10
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	16
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	18
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Terpilih	19
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	21
3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	22
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	23
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	24
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD Kab. Boalemo	24
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	27
BAB VII. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	28
BAB VIII. PENUTUP	30

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Boalemo	8
Tabel 2.2	ANS BKAD Menurut Golongan Ruang	10
Tabel 2.3	ANS BKAD Menurut Pendidikan Formal	11
Tabel 2.4	ANS BKAD Menurut Esselon	12
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi Ketiga Kabupaten Boalemo 2023 –2026	23
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Boalemo 2023 –2026	24
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan	25
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Sasara, dan Pendanaan Indikatif Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo	29
Tabel 7.1	Indikator Kinerja BKAD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 – 2026 merupakan amanat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun merupakan sebuah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan empat tahun periode perencanaan yang menjabarkan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2023 – 2026, yang merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal dan Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan serta instrument untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Penjabat (Pj) Bupati Boalemo. Renstra juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja atau RENJA Perangkat Daerah dan menjadi pedoman bagi penilaian kinerja instansi pemerintah oleh lembaga audit baik internal ataupun eksternal. Renstra ini dibuat berdasarkan kondisi riil organisasi dengan dinamika, permasalahan dan perkembangan yang begitu signifikan. Penyusunan Renstra ini diharapkan mampu untuk menjadi dokumen acuan dalam

pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Boalemo.

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang akan memutuskan program apa yang akan dijalankan oleh suatu organisasi perangkat daerah serta berapa jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program untuk beberapa tahun mendatang. *Perumusan strategis* adalah proses memutuskan strategi baru, sedangkan perencanaan strategis adalah proses mengimplementasikan strategi. Rencana Strategis BKAD Kabupaten Boalemo dirumuskan dan disusun berdasarkan pada RPD Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026. Renstra BKAD Kabupaten Boalemo juga dibuat dengan memperhatikan aspirasi dan isu yang berkembang serta berbagai Kebijakan Pemerintah yang akan dilaksanakan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Boalemo. Sesuai dengan Perda Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah disebutkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan di bidang pendapatan, anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah. Sehubungan dengan itu maka BKAD Kabupaten Boalemo berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Boalemo serta tetap memperhatikan kebijakan dari Kabupaten yang disertai kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dari pemerintahan pusat.

Tujuan atau sasaran strategis dalam Renstra K/L yang juga merupakan Tujuan atau sasaran strategis dari Renstra BKAD yang mengacu pada RPJMD kabupaten Boalemo dalam urusan pengelolaan keuangan daerah adalah Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Baik Dengan Indeks Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah atau LKPD. Dimana Opini BPK ini terbagi kedalam 4 (empat) skala yakni :

- Skala 1 : Tidak wajar (*Adverse*)
- Skala 2 : Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)
- Skala 3 : Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified*)
- Skala 4 : Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*)

Dalam hal ini Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo adalah WTP (Skala 4), perolehan WTP untuk Kabupaten Boalemo pada tahun ini telah memasuki tahun ke-5. Dengan sasaran Strategi meningkatkan kapasitas aparat pengelolaan keuangan dilingkungan pemerintah daerah dengan tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menuju opini dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Penyusunan Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Kabupaten Boalemo tahun 2017-2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana 4na telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,rencana pembangunan jangka menengah daerah,dan rencana kerja pemerintah daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,rencana pembangunan jangka menengah daerah,dan rencana kerja pemerintah daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi,kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031; (Lembaran Daerah

- Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 238);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boalemo Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 284);
 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat Daerah Kabupaten Boalemo;
 21. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kerja (renja) tahunan
2. Menjadi tolok ukur bagi unit kerja pada badan keuangan secara konsekwen dan konsisten dalam penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
3. Untuk memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategi.
4. Sebagai satu pedoman yang mencerminkan arah langkah dan kegiatan yang akan di lakukan oleh badan keuangan selama kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Naskah Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DANASET DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Telaahan RenstraK/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD Kab. Boalemo

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Boalemo yang melaksanakan urusan penunjang fungsi Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Boalemo.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo mempunyai tugas pokok *"penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keuangan dan aset daerah"*.

Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah :
2. Penyusunan rancangan APBD dan APBD Perubahan .
3. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah .
4. Pengkoordinasian penerimaan pendapatan asli daerah .
5. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Penatausahaan barang milik daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Boalemo, maka Struktur Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Boalemo terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan dan membawahi :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan membawahi :
1. Sub. Bidang Anggaran;
 2. Sub. Bidang Perbendaharaan.
- d. Bidang Pendapatan membawahi :
1. Sub. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
 2. Sub. Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan
- e. Bidang Aset membawahi :
1. Sub. Bidang Aset I;
 2. Sub. Bidang Aset II
- f. Bidang Akuntansi membawahi :
1. Sub. Bidang Akuntansi I;
 2. Sub. Bidang Akuntansi II

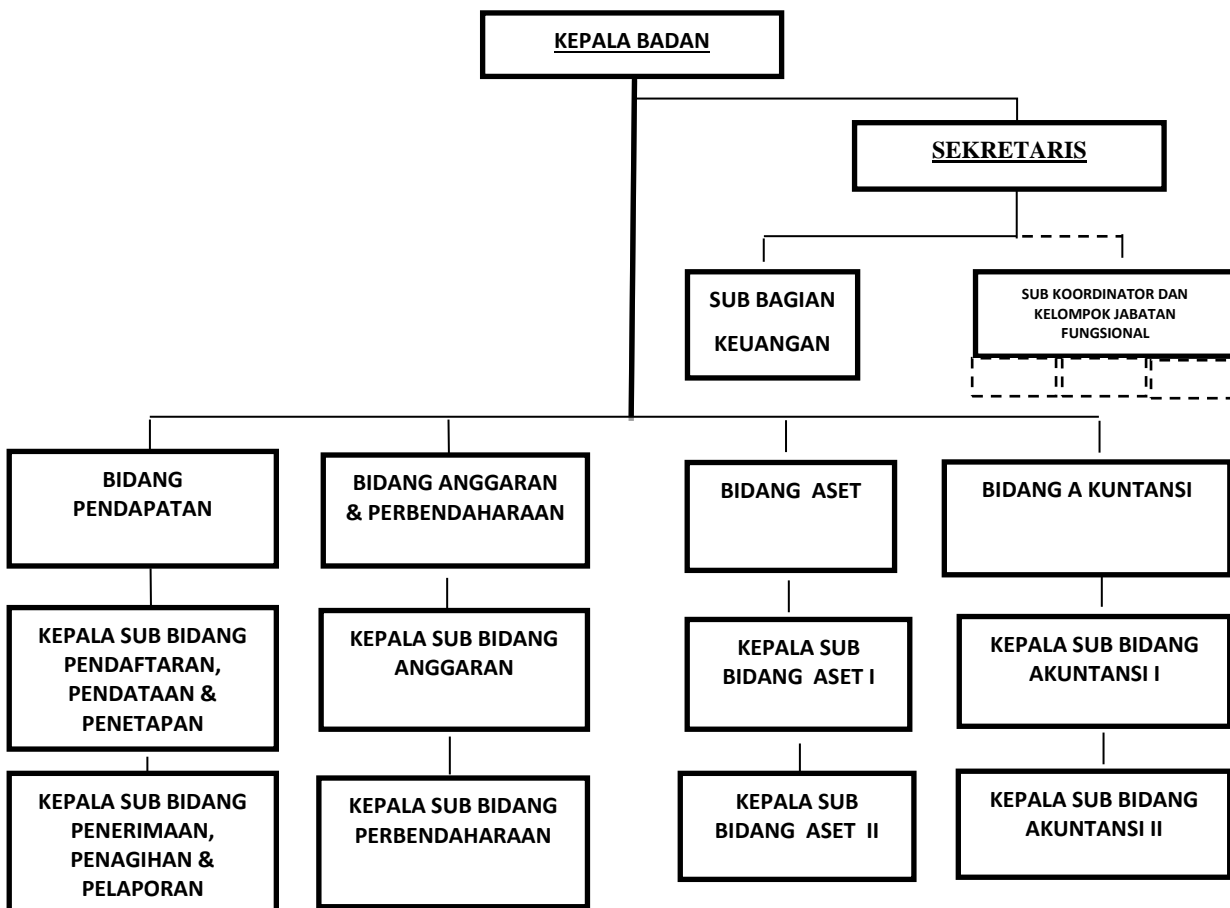
Adapun dalam implementasinya, seringkali kegiatan besar dilaksanakan secara bersama yang melibatkan semua bidang ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut, hal ini menimbulkan rasa kebersamaan yang kuat dan bisa menghasilkan kegiatan yang berkualitas karena didukung oleh seluruh komponen di dalam organisasi. Untuk kelancaran tugas dan pelaksanaan kegiatan di BKAD secara rutin dilaksanakan rapat internal. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai tahapan dan sukses. Sedangkan dalam hal Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang ada sangat terbatas yang seringkali diperhadapkan pada volume kerja yang cukup banyak dan tuntutan penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang singkat, tepat waktu dan cepat hingga hal ini mengakibatkan ASN dengan beban pekerjaan yang melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga seringkali melaksanakan lembur untuk merampungkan pekerjaan yang belum selesai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Penyelenggara keuangan daerah yang cukup kompleks di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo dapat diuraikan dalam tugas dari masing-masing pejabat sesuai Peraturan Daerah No 5 Tahun

2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Boalemo

Gambar 2.1. Struktur Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BKAD Kab. Boalemo



2.2 SUMBER DAYA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Dalam menjalankan tugas dan Fungsinya baik secara administratif maupun operasional pada badan Keuangan dan aset daerah Kab.Boalemo perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan aset/sarana dan prasarana yang dimiliki.

Pada saat ini Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan di BKAD Kabupaten Boalemo berjumlah 63 (tujuh puluhdelapan) orang di tambah dengan Tenaga Penunjang Kegiatan berjumlah 41 (Empat Puluh Satu) Orang dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam, untuk mendukung kinerja pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Boalemo karena Badan Keuangan dan Aset daerah memiliki tugas dan fungsi yang cukup penting sehingga dokumen-dokumen perencanaan dan hasil rencana serta dokumen penunjang lainnya harus dibuat dengan se-detail mungkin guna menghasilkan kebijakan yang tepat dalam hal pengelolaan keuangan dan juga pengelolaan aset daerah.

Untuk mencapai tujuan organisasi maka seluruh komponen organisasi diarahkan untuk berperan serta secara aktif dalam membangun sistem yang solid, implementasinya adalah selalu bekerjasama dalam tim sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan bersama, tidak mewakili kepentingan orang per orang tapi yang muncul adalah kebijakan yang berasal dari hasil musyawarah tim. Manajemen kerja yang efisien, efektif waktu dan responsif sampai saat ini mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang cukup membantu pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi Boalemo Yang Maju, Mandiri, Dan Religius.

Hal yang masih harus dilengkapi dan diperbaiki dari segi Sumber Daya Manusia di BKAD Kabupaten Boalemo adalah perlunya disiapkan aparatur berlatar belakang Ilmu Akuntansi serta menguasai bidang IT, sehingga menjadikan Aparatur BKAD yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas, hal ini berlaku bagi mereka yang menduduki eselon di BKAD yaitu eselon IV, III sampai dengan eselon II. Hal ini *sangat penting sekali* mengingat sebagai instansi penunjang, BKAD diharapkan mampu membuat kebijakan-kebijakan strategis dalam waktu yang cepat. Serta aparatur dibekali dengan teknik perumusan strategi yang baik dalam hal pengambilan keputusan di lingkup organisasi, tentunya hal ini menjadi nilai plus bagi organisasi karena setiap kali dibutuhkan

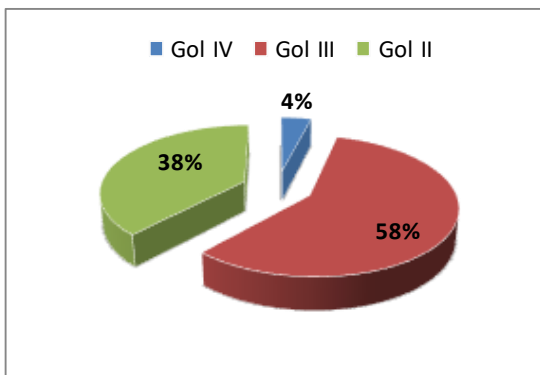
kapanpun/bagaimanapun, mampu menghasilkan sebuah karya atau kinerja yang diharapkan.

Kebijakan yang berkualitas dan mempunyai jangkauan yang luas serta tidak memiliki resiko hukum karena kebijakan yang diambil sudah dipertimbangkan secara matang dan terukur dengan baik. Tabel 2.2 berikut ini menggambarkan formasi ASN di BKAD Kabupaten Boalemo pada saat ini :

Tabel 2.2 ASN BKAD menurut Golongan dan Ruang

NO	GOLONGAN	BIDANG						JLH
		KABAN	SEKRETARIS	PENDAPATAN	ANGGARAN	AKUNTANSI	ASET	
1	IV	1	1	-	-	1	-	3
2	III		6	11	13	3	8	41
3	II		6	5	4	2	1	18
4	I			-	1	-	-	1
JUMLAH		1	13	21	17	6	9	63

Selain Aparatur Sipil Negerayang berjumlah 63 (tujuh puluhan) orang, tugas-tugas keseharian di BKAD Kabupaten Boalemo juga dibantu oleh beberapa orang tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) yang bertugas sesuai bidangnya, mereka ditempatkan untuk membantu kegiatan administrasi perkantoran dan cleaning service. Seleksi Tenaga Penunjang Kegiatan ini dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah Kab.Boalemo kompleksnya permasalahan yang terjadi di BKAD memerlukan bantuan tenaga administratif untuk mendukung sistem kerja agar tugas pokok dan fungsi BKAD dapat dilaksanakan dengan baik serta menghasilkan output pekerjaan yang tepat waktu dan berkualitas. Berikut ini adalah Tabel 2.3 yang menggambarkan komposisi ASN di BKAD berdasarkan pendidikan formal yang dimilikinya :

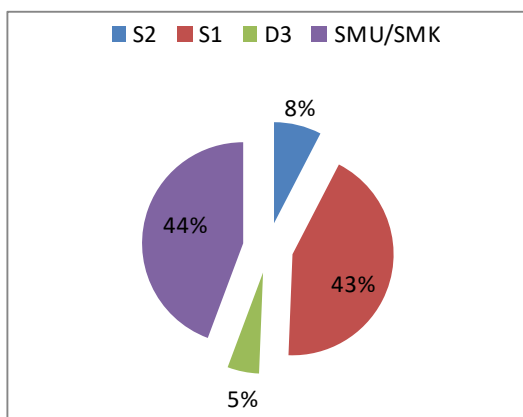


Tabel 2.3 ASN BKAD Menurut Pendidikan Formal

NO	JENJANG PENDIDIKAN	BIDANG						JLH
		KABAN	SEKRETARIS	PENDAPATAN	ANGGARAN	AKUNTANSI	ASET	
1	S2	1	1	1	-	-	-	3
2	S1		6	8	11	3	8	36
3	D3		-	1	3	-	-	4
4	D1		1					1
5	SMU/SMK/MA		6	6	4	2	1	19
JUMLAH		1	13	16	18	5	9	63

Ada beberapa ASN di BKAD Kab.Boalemoyang penempatannya tidak begitu sesuai dengan disiplin ilmunya, tidak selaras antara latar belakang pendidikannya dengan bidang kerjanya, hal ini memerlukan analisis lebih lanjut tentang penempatan ASN agar bisa ditempatkan sesuai dengan keahliannya (*right man on the right place*), namun demikian dengan lingkungan kerja yang cukup nyaman di BKAD diharapkan setiap ASN bisa berinteraksi dengan baik dalam satu hubungan kerja yang harmonis demi mencapai tujuan organisasi. Selain itu untuk lebih memantapkan kinerja ASN maka telah beberapa kali dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang intinya adalah pemahaman tentang implementasi *accrualbasis accounting (akuntansi berbasis akrual)*.Hal ini dimaksudkan agar ASN dengan berbagai latar belakang pendidikan bisa mengerti dan lebih memahami fungsinya sebagai ASN yang bekerja di bidang Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah.Tabel 2.4 dibawah ini menggambarkan Struktur ASN menurut eselonering di BKAD Kabupaten Boalemo :



Tabel 2.4 ASN BKAD Menurut Eselon

No.	Eselonisasi	Jumlah(org)
1	Kepala Badan (EselonII)	1
2	Sekretaris (EselonIII)	1
3	Kepala Bidang (EselonIII)	4
4	Kepala Sub Bagian(Eselon IV)	3
5	Kepala Sub Bidang (Eselon IV)	8
	JUMLAH	17

Sarana Dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan serta program dan kegiatan yang dilaksanakan maka BKAD Kabupaten Boalemo dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang untuk kenyamanan para pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta dilengkapi dengan jaringan internet serta fasilitas lainnya.

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dari kinerja pelayanan pada sector pengelolaan daerah.

Sasaran kinerja yang di laksanakan badan keuangan dan aset daerah kab.boalemo Perangkat Daerah yang mela sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang urusan keuangan meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah, badan keuangan dan aset daerah kab.boalemo juga melakukan pembinaan pengelolaan aset berupa pemberian pedoman penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah, Pedoman penatausahaan dan penyusunan aset.

Adapun dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab badan keuangan dan aset daerah kab.boalemo tidak lari dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

Pengelolaan keuangan daerah saat ini berdasarkan pada (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penjelasan Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Boalemo atas Tabel tersebut di atas sebagai berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Boalemo

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%

Tilamuta, Januari 2022
Kepala BKAD Kab. Boalemo

Drs. Mohammad Taufiq Kumali, MM
Nip. 19691114 199010 1 001

Penjelasan terhadap pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Boalemo atas table tersebut diatas sebaga berikut :

- **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2017 s/d 2021**

Opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo dari Tahun 2017 – 2021 berhasil didapatkan dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan.

- **Sistem Pengendalian Internal**

Dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian pengelolaan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Boalemo menggunakan beberapa Aplikasi sebagai berikut :

- APLIKASI PENGELOLA KEUANGAN
- APLIKASI BMD
- APLIKASI PENDAPATAN
- APLIKASI GAJI
- APLIKASI PERSEDIAAN

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BKAD termasuk dalam Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang memiliki beberapa program yakni :																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.778.150.000,00	1.798.145.000,00	1.817.145.000,00	1.838.145.000,00	1.858.145.000,00	2.843.625.667,00	4.580.861.419,00	4.492.930.706,00	4.700.004.367,00	2.077.140.591,00	1.60	2.55	2.47	2.56	1.12	0.19	0.27
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat	341.250.000,00	438.750.000,00	435.750.000,00	455.750.000,00	478.750.000,00	288.271.400,00	790.203.666,00	147.754.682,00	77.094.655,00	56.785.000,00	0.84	1.80	0.34	0.17	0.12	0.14	1.02
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola	5.550.600.000,00	5.636.400.000,00	5.721.300.000,00	5.806.300.000,00	5.896.300.000,00	6.001.291.682,00	5.018.823.896,00	3.964.994.339,00	4.894.247.791,00	5.431.461.539,00	1.08	0.89	0.69	0.84	0.92	0.19	0.22

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo :

a. Faktor Internal :

- 1). Kekuatan/Potensi(1). Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi; (2). Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi; (3).Tersedianya

sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi; (4). Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah; (5). Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 2). Kelemahan (1). Masih terbatasnya sarana penunjang kerja (2). Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan ASN yang berlatar belakang akuntansi.

b. Faktor Eksternal :

- 1). Kesempatan/Peluang (1). Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah; (2) Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik; (3). Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh SOPD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah; (4). Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.
- 2). Tantangan/Ancaman (1). Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance; (2). Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah di OPD; (3). Pengawasan terhadap pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

BAB III

PERMASALAHANDAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANANBADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Mengacu pada tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo, maka peranan BKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan Daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo, antara lain :

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;

2. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Adanya Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah, merupakan sistem informasi yang sangat bermanfaat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah
4. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di SOPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang daerah di SOPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan;
5. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan aset-aset daerah, sehingga asset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah.

2.2 TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 2023 - 2026

Visi Kabupaten Boalemo yang merupakan buah pemikiran dalam perumusan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo adalah merupakan cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo di masa mendatang sehingga visi selalu berpijak pada kondisi, potensi, tantangan dan hambatan yang ada. Sehubungan dengan analisis dan pendalaman tersebut, maka Visi Misi Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut :

A. Visi

Mengacu pada dasar pemikiran yang telah telah diurai sebelumnya maka rumusan Visi Jangka Panjang Pembangunan Kabupaten Boalemo 2011-2025 yaitu:

“BOALEMO YANG MAJU, MANDIRI DAN RELIGIUS “

Kata kunci dalam Visi tersebut diuraikan sebagai berikut :

✚ **Boalemo Maju**, suatu cita-cita atau kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Boalemo yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang memiliki derajat kualitas kehidupan yang baik dan produktif serta didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.

Dengan suasana yang demikian maka setiap masyarakat akan berpacu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

✚ **Boalemo Mandiri**, artinya suatu cita-cita dari pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kemampuan dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta kewenangan dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat dan daerah.

✚ **Boalemo Religius**, artinya suatu cita-cita masyarakat Boalemo untuk selalu mencerminkan nilai-nilai keagamaan dalam perilaku kehidupan serta praktek penyelenggaraan pemerintahan.

B. Misi

Misi pada dasarnya adalah merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan di atas dapat dicapai. Dengan kata lain; misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Boalemo ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan Kabupaten Boalemo :

- Mewujudkan Perekonomian Boalemo yang Handal dan Berdaya Saing
- Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Religius
- Mewujudkan Pemerintahan Daerah Boalemo yang Amanah

Untuk keberhasilan yang nantinya akan dicapai pada kondisi akhir tahun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo telah menetapkan Tujuan dan Sasaran yang menjadi pandangan dan/atau Fokus kerja Perangkat Daerah selaku unsur perangkat kerja yang membantu tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam menanggapi permasalahan dan solusi terhadap Arah Kebijakan Utama dan Isu strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

Telaahan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026 memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Hal ini ditunjukkan dengan salah satu Tujuan dan sasaran yang relevansi pada Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026 sebagai berikut :

“ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal, Stabilitas Politik, Keamanan dan Keterlibatan Daerah”

Tujuan dari terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal, Stabilitas Politik, Keamanan dan Keterlibatan Daerah, dapat dijabarkan oleh sasaran :

- Meningkatnya Kualitas tata kelola pelayanan publik
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi, keamanan dan ketertiban daerah

2.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami

pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program

3.4 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA BKD PROV.GORONTALO

Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang sinergi dengan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo adalah:

Tabel 3.4
Telaah Renstra Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Kementerian Dalam Negeri	Sasaran Kementerian Keuangan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendukung
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif	Alokasi Belanja dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat	Tingkat Pemahaman pejabat pengelola keuangan daerah terkait Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah Belum Optimal.	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pejabat pengelola keuangan daerah terkait peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah	Mengintensifkan sosialisasi,IHT (In - House Training) dan Pendampingan pada Perangkat Daerah

3.5 PENETUAN ISU ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 – 2026, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo, dapat diketahui bahwa isu – isu strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo adalah :

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
2. Dengan banyaknya perubahan kebijakan regulasi terkait Pengelola Keuangan Daerah sehingganya perlu meningkatkan kompetensi SDM Pejabat Pengelola Keuangan pada perangkat daerah

3. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan daerah dengan Sistem Pengelolaan Pendapatan dan sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam satu sistem guna mewujudkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan daerah;
4. Menciptakan Inovasi untuk menggali Potensi Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah serta lain – lain PAD yang sah melalui kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD.
5. Menerapkan Manajemen Sistem Pembayaran elektronik guna efektifitas kinerja dalam pengelolaan APBD.
6. Peningkatan manajemen mutu pelayanan, kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengelolaan pendapatan dalam upaya peningkatan pendapatan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan Adalah Kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang berisi pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu Visi dan Misi Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 – 2026. Sejalan dengan agenda pembangunan Kabupaten Boalemo sesuai dengan Sasaran yang akan di capai dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo 2023 - 2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo telah Menetapkan Tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BKAD Kabupaten Boalemo
2. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas,transparan dan akuntabel

4.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapaiannya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategis Organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo adalah:

- 1.Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan public.
- 2.Meningkatkan tata kelola keuangan Daerah yang efektif,efisien,transparan dan akuntabel

Berikut ini Tabel 4.2 yang berisi tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGUKURAN/INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	CAPAIAN AWAL TAHUN	Proyeksi Capaian 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
									2023	2024	2024	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola BKAD Kabupaten Boalemo	Nilai SAKIP Kabupaten											
			Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	Hasil Evaluasi Sakip	Predikat	B	B	B	BB	BB	A	A
				Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti : total temuan OPD tahun berjalan x 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah Penerimaan PAD Badan Keuangan dan Aset Daerah	Total Realisasi PAD Dalam (n) / Target PAD X 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100
				Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan BKAD Kab.Boalemo	Jumlah BMD dalam kondisi baik : Jumlah Total BMD x 100	Persen	80	80	80	80	80	80	80

				Presentase ASN yang mengikuti Bimbingan teknis di lingkungan BKAD	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis : total jumlah ASN x 100	Persen	25	25	30	35	40	50	50
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas,transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan			Jumlah Seluruh Hasil Indeks Dimensi	Indeks	N/A	N/A	70	70	70	70	70
			Meningkatnya tata kelola keuangan Daerah yang efektif,efisien,transparan dan akuntabel	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Nilai Kesesuaian Numenklatur Program/Pagu (RPJMD,RKPD,KUA PPAS dan APBD) : 5 dokumen Perencanaan dan penganggaran dan dikali bobot Nilai (15)	Indeks	N/A	N/A	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
				Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	Skor Nilai Rata-rata Dimensi Pengalokasia Anggaran Belanja Dalam APBD x Bobot nilai (20)	Indeks	N/A	N/A	20	20	20	20	20
				Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Perkalian skor rata-rata dengan bobot nilai (15)	Indeks	N/A	N/A	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
				Penyerapan Anggaran	Nilai Skor Rata-Rata dari Penyerapan Anggaran x Bobot	Indeks	N/A	N/A	20	20	20	20	20

					Nilai(20)								
				Kondisi Keuangan Daerah	Hasil Skor Rata-Rata Indeks Dimensi Indikator Kondisi Keuangan x Bobot Nilai (15)	Indeks	N/A	N/A	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
				Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas LKPD	Skor Hasil Pengukuran Indeks Dimensi Opini BPK x Bobot Nilai (15)	Indeks	N/A	N/A	15	15	15	15	15

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu-isu strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah hadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan memiliki keterkaitan dengan Tujuan yang akan dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun sesuai yang dijelaskan dalam tabel di 4.2 diatas.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo (RPD) Tahun 2023 - 2026.

Strategi dan kebijakan adalah langkah-langkah yang menunjukkan bagaimana cara Badan Keuangan dan Aset Daerah mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah bagi setiap program prioritas. Pengelolaan keuangan daerah haruslah berlandaskan azas transparansi karena BKAD merupakan lembaga publik yang tidak bisa lepas dari pengawasan/ audit baik internal maupun eksternal. Sehingga setiap program/ kegiatan yang dilakukan oleh BKAD haruslah berorientasi pada kinerja dan menuju pada pelayanan publik yang profesional. Hal ini selaras dan sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Boalemo.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola BKAD Kabupaten Boalemo	Indeks Reformasi Birokrasi	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Inklusif dan Responsif	Mengimplementasikan Prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan	Peningkatan Kinerja Akuntabilitas dan Profesionalisme Pemerintahan	Penguatan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo merupakan program prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo (RPD) Tahun 2023 -2026 yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo. Program dan indicator kinerja (outcome) serta indikasi pagu anggarannya selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing –masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.

Dibawah ini adalah table Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola BKA D Kabupaten Boalemo				Indeks Reformasi Birokrasi		56%	18,978,439,200	58%	19,097,938,600	60%	19,097,938,600	62%	19,097,938,600	62%			BKAD KAB.BO ALEMO	

		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu		100 %	150,000,000	100 %	170,000,000	100 %	170,000,000	100 %	170,000,000	100%			
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen			
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	130,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan			
		5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan			

		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang tepat waktu		100 %	16,602,938,600	100 %	16,602,938,600	100 %	16,602,938,600	100 %					
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Oran g/Bu lan	16,602,938,600	Oran g/Bu lan	16,602,938,600	Oran g/Bu lan	16,602,938,600	Oran g/Bu lan	16,602,938,600	Orang/ Bulan			
		5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Laporan BMD yang tepat waktu		100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %			

		5.02.01.2.03	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan			
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD		100 %	70,000,000	100 %	70,000,000	100 %	70,000,000	100 %	70,000,000	100 %			
		5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen			
		5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		63 Dokumen	35,000,000	63 Dokumen	35,000,000	63 Dokumen	35,000,000	63 Dokumen	35,000,000	63 Dokumen			

		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Kantor		100 %	445,000,000	100 %	445,000,000	100 %	445,000,000	100%			
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15 Paket	70,000,000	15 Paket	70,000,000	15 Paket	70,000,000	15 Paket			
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	375,000,000	1 Laporan	375,000,000	1 Laporan	375,000,000	1 Laporan			
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD		100 %	50,000,000	100 %	350,000,000	100 %	350,000,000	100%			

		5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50,000,000	Unit	350,000,000	Unit	350,000,000	Unit	350,000,000	Unit			
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	100 %	1,200,500,600	100 %	1,100,000,000	100 %	1,100,000,000	100 %	1,100,000,000	100 %			
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,200,500,600	1 Laporan	1,100,000,000	1 Laporan	1,100,000,000	1 Laporan	1,100,000,000	1 Laporan			

		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik		100 %	400,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100%			
		5.02.01.2.09.01	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan	Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan DinasJabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya Dipelihara		3 Unit	200,000,000	3 Unit	200,000,000	3 Unit	200,000,000	3 Unit	200,000,000	3 Unit			
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan	Jumlah Kendaraan DinasOperasional atauLapangan yangDipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	100,000,000	3 Unit	100,000,000	3 Unit	100,000,000	3 Unit	100,000,000	3 Unit			
		5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	100,000,000	3 Unit	100,000,000	3 Unit	100,000,000	3 Unit	100,000,000	3 Unit			

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		70	132,384,557,200	70	132,453,196,475	70	132,523,551,784	70	132,595,665,896	70	
Meningkakannya tata kelola keuangan dan aset daerah yang			Opini BPK atas LKPD Kab.Boalemo		WTP	132,384,557,200	WTP	132,453,196,475	WTP	132,523,551,784	WTP	132,595,665,896	WTP	

berkualitas, transparan dan akuntabel																			
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penepatan APBD Tepat Waktu		100 %	126,608,338,200	100 %	126,676,977,475	100 %	126,747,332,784	100 %	126,819,446,896	100%						
	5.02.02.201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah		4 Dokumen	1,151,863,142	4 Dokumen	1,151,863,142	4 Dokumen	1,151,863,142	4 Dokumen	1,151,863,142	4 Dokumen						

	5.02.02.201.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		1 Dokumen	343,445,000	1 Dokumen	343,445,000	1 Dokumen	343,445,000	1 Dokumen			
	5.02.02.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		1 Dokumen	212,244,000	1 Dokumen	212,244,000	1 Dokumen	212,244,000	1 Dokumen			
	5.02.02.201.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		1 Dokumen	317,297,327	1 Dokumen	317,297,327	1 Dokumen	317,297,327	1 Dokumen			
	5.02.02.201.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		1 Dokumen	278,876,815	1 Dokumen	278,876,815	1 Dokumen	278,876,815	1 Dokumen			

		5.02.02.202	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		1 Laporan	730,612,471	1 Laporan	756,022,371	1 Laporan	782,067,571	1 Laporan	808,763,821	1 Laporan			
		5.02.02.202.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen			
		5.02.02.202.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		1 Dokumen	175,000,000	1 Dokumen	175,000,000	1 Dokumen	175,000,000	1 Dokumen	175,000,000	1 Dokumen			
		5.02.02.202.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	131,022,371	1 Dokumen	157,067,571	1 Dokumen	183,763,821	1 Dokumen			

		5.02.02.202.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	138 Orang	330,612,471	138 Orang	300,000,000	138 Orang	300,000,000	138 Orang	300,000,000	138 Orang			
		5.02.02.202	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan daerah	1 Laporan	964,981,287	1 Laporan	964,981,287	1 Laporan	964,981,287	1 Laporan	964,981,287	1 Laporan			
		5.02.02.203.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	47 Laporan	230,683,960	47 Laporan	230,683,960	47 Laporan	230,683,960	47 Laporan	230,683,960	47 Laporan			

		5.02.02.203.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		2 Dokumen	317,297,327	2 Dokumen	317,297,327	2 Dokumen	317,297,327	2 Dokumen	317,297,327	2 Dokumen			
		5.02.02.203.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen			
		5.02.02.203.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen			

		5.02.02.203.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen					
		5.02.02.203.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		57 Orang	217,000,000	57 Orang	217,000,000	57 Orang	217,000,000	57 Orang	57 Orang				
		5.02.02.204	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Tahun	123,760,881,300	1 Tahun	123,804,110,675	1 Tahun	123,848,420,784	1 Tahun	123,893,838,646	1 Tahun			

		5.02.02.204.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		2 Laporan	121,031,706,300	2 Laporan	121,031,706,300	2 Laporan	121,031,706,300	2 Laporan	121,031,706,300	2 Laporan			
		5.02.02.204.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		1 Laporan	1,000,000,000	1 Laporan	1,000,000,000	1 Laporan	1,000,000,000	1 Laporan	1,000,000,000	1 Laporan			
		5.02.02.204.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		2 Laporan	1,729,175,000	2 Laporan	1,772,404,375	2 Laporan	1,816,714,484	2 Laporan	1,862,132,346	2 Laporan			

		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase inventarisasi aset milik daerah		100 %	2,765,219,000	100 %	2,765,219,000	100 %	2,765,219,000	100 %	2,765,219,000				
		5.02.03.201	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah		1 Dokumen	2,765,219,000	1 Dokumen	2,765,219,000	1 Dokumen	2,765,219,000	1 Dokumen	2,765,219,000				
		5.02.03.201.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	600,000,000				
		5.02.03.201.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		2 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	300,000,000				

		5.02.03.201.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	500,000,000			
		5.02.03.201.05	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	415,219,000	1 Laporan	415,219,000	1 Laporan	415,219,000	1 Laporan	415,219,000			
		5.02.03.201.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	350,000,000			
		5.02.03.201.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	300,000,000			

		5.02.03.201.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		236 Oran g	300,000,000	236 Oran g	300,000,000	236 Oran g	300,000,000	236 Oran g	300,000,000	236 Orang			
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD		100 %	3,011,000,000	100 %	3,011,000,000	100 %	3,011,000,000	100 %	3,011,000,000	100%			
		5.02.04.201	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan		1 Dok ume n	3,011,000,000	1 Dok ume n	3,011,000,000	1 Dok ume n	3,011,000,000	1 Dok ume n	3,011,000,000	1 Dokum en			
		5.02.04.20	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		1 Lapo ran	830,000,000	1 Lapo ran	830,000,000	1 Lapo ran	830,000,000	1 Lapo ran	830,000,000	1 Lapora n			

		5.02.04.201.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		3 Unit	931,000,000	3 Unit	931,000,000	3 Unit	931,000,000	3 Unit	931,000,000	3 Unit			
		5.02.04.201.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Laporan	750,000,000	1 Laporan	750,000,000	1 Laporan	750,000,000	1 Laporan	750,000,000	1 Laporan			
		5.02.04.201.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		1 Laporan	500,000,000	Laporan	500,000,000	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam Empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Boalemo. indikator kinerja BKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Boalemo 2023 – 2026. Dalam Meningkatkan Pengelolaan keuangan daerah dengan baik dengan sasaran Meningkatnya tata kelola keuangan Daerah yang efektif,efisien,transparan dan akuntabel. Sesuai fungsi dari BKAD sebagai instansi yang menjalankan fungsi Unsur Penunjang Pemerintah dalam bidang Keuangan di Kabupaten Boalemo. Adapun indikator kinerja dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Boalemo 2017– 2022 dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel7.1

Indikator Kinerja BKAD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJABKAD	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGETCAPAIANSETIAPTAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		Tahunke-1	Tahunke-2	Tahunke-3	Tahunke-4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN	N/A	70	70	70	70	70

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 merupakan landasan atau acuan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada, karena rangkaian kegiatan mulai Visi, Misi, Tujuan, Strategis dan Sasarannya adalah sebagai komitmen dari seluruh pegawai yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat ditentukan oleh kemampuan Sumberdaya Manusia, baik secara teknis maupun managerial, penempatan ASN yang tepat sesuai Disiplin Ilmu maupun pengalaman, bakat, minat dan sikap serta pengabdian yang tinggi. Dalam hal sarana Prasarana juga harus memadai sesuai dengan peruntukannya serta anggaran yang menunjang seluruh program kegiatan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Boalemo Tahun 2023-2026 ini juga merupakan hasil rumusan berdasarkan skala prioritas dan apabila terdapat perubahan dan akselerasi yang timbul dapat diubah serta disempurnakan kembali.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BOALEMO**



Drs. MOHAMMAD TAUFIQ KUMALI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA IV/C
NIP. 19691114 199010 1 001